PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 -2018)

Ahmad Fajri
Fajriahmad320@gmail.com

Dr. M Khoiru Rusydi, M.Ak., CA., Ak.

Accounting Department, Faculty of Economics and Business
Brawijaya University
Jl. MT Haryono 165 Malang, 65145, Indonesia

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara koneksi politik terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018). Populasi penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016 hingga 2018. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan didapat sejumlah 66 perusahaan sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan. Variabel kontrol *return on asset* dan *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Variabel kontrol *leverage* dan *size* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

ABSTRACT: The aim of this research is to determine and analyze the influence of political connection on tax avoidance. The populations of the research consist of manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange between 2016 and 2018. From the purposive sampling method are 66 companies obtained as research samples. The multiple regression analysis indicates that political connection has a positive and significant effect on tax avoidance; the control variable, Return On Asset and Capital Intensity, has a negative and significant effect on tax avoidance, while leverage and size has no effect on tax avoidance.

Kata kunci : penghindaran pajak, koneksi politik, perusahaan manufaktur.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sebuah kontribusi wajib masyarakat kepada negara, yang memiliki kewajiban membayar pajak adalah orang pribadi atau badan, pajak sendiri bersifat memaksa berdasarkan undang–undang. Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung kepada yang membayarnya, tetapi pajak digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Menurut (undang - undang nomor 28 tahun 2007) menjelaskan bahwa pajak digunakan untuk membiayai belanja keperluan negara, yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak menjadi sumber pendapatan untuk negara, tetapi bagi perusahaan merupakan biaya yang mengurangi laba (Wicaksono, 2017) karena menurut undang–undang No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Perusahaan menjadikan pajak sebagai pengeluaran yang wajib dikeluarkan. Oleh sebab itu banyak perusahaan yang menghindari pembayaran pajak.

Perusahaan dalam menjalankan bisnis bertujuan mencapai target laba yang maksimal dengan meminimalkan pengeluaran, salah satu bentuk pengeluaran perusahaan adalah pajak. Jumlah pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah tergantung kepada tinggi atau rendahnya laba yang dihasilkan dalam satu periode pajak

Salah satu cara mengurangi beban perpajakan adalah dengan melakukan manajemen pajak atau perencanaan pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan atau penghindaran pajak *(Tax Avoidance) (*Zain,2008 hal. 42). Menurut (Zain, 2008 hal 43) *tax avoidance* adalah salah satu contoh *tax planning* yang dapat dilakukan melalui proses pengelolaan laba untuk mengurangi pengenaan pajak yang tidak diinginkan perusahaan.

Selain itu baru–baru ini juga terdapat kasus yang cukup hangat yang datang dari laporan global witness yang mengemukakan bahwa PT. Adaro Energy Tbk Melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* kepada anak perusahaan yang ada di Singapura Coaltrade Services International. Upaya tersebut terduga telah dilakukan selama tahun 2009 – 2017. Fenomena yang terjadi di Indonesia yang mendukung bahwa koneksi politik adalah salah satu upaya bentuk penghindaran pajak. Tokoh politik yang ada di dalam PT. Adaro Energy yang menjabat sebagai salah satu pemegang saham di dalam perusahaan dan juga menduduki jabatan di sebuah partai politik ialah tokoh nasional Sandiaga Salahudin Uno yang juga menjabat sebagai wakil

dewan Pembina partai gerindra (www.detik.finance.com 18 Februari 2020).

Kasus–kasus penghindaran pajak di atas menunjukan bahwa sebagian besar tindakan ini dimotivasi oleh usaha perusahaan dalam menghindari pajak dan menghemat pengeluaran dari sektor perpajakan supaya mengurangi biaya yang dikeluarkan dan menaikkan laba perusahaan. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip semua perusahaan yaitu meraup laba yang sebesar–besarnya dengan melakukan penghindaran pajak melalui hubungan dengan politisi untuk dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan termasuk dalam hal perpajakan (Hidayati & Diyanty, 2018)

Koneksi politik bertujuan mengakomodasi kepentingan perusahaan termasuk di dalamnya kepentingan perpajakan (Wicaksono, 2017). Koneksi politik sering terjadi di negara–negara berkembang yang dimana koneksi politik tersebut dilakukan dengan menempatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah sehingga pihak pemerintah memiliki koneksi terhadap struktur organisasi perusahaan apakah itu komisaris maupun direksi (Fisman, 2001).

Kim & Zhang (2016) menyebutkan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan dapat melindungi perusahaan dari risiko deteksi tindakan pajak agresif. Berdasarkan kasus penyalahgunaan koneksi politik membuktikan bahwa salah satu upaya penghindaran pajak adalah dengan adanya keterkaitan koneksi politik pengendali bisnis dengan aparatur pemerintah atau partai politik. Maka semakin kuat koneksi politik yang dimiliki semakin besar pula peluang untuk menghindari pajak. Penelitian terkait dengan pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian (Kim & Zhang 2016) mengungkapkan bahwa koneksi politik perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena dapat mempengaruhi dalam mengecilkan jumlah pajak dan mendapat informasi tentang peraturan perpajakan. Selain itu, (Wicaksono, 2017) mengungkapkan bahwa koneksi politik melalui hubungan komisaris berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, dari hasil tersebut menunjukan koneksi politik yang dilakukan oleh perusahaan BUMN maupun BUMS adalah untuk melakukan lobby dengan pemerintah untuk menghindari pemeriksaan pajak.

Melihat fenomena kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak maka peneliti ingin melakukan penelitian yang merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya (Hidayati & Diyanty, 2018). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Hidayati & Diyanty, 2018) yang juga menguji pengaruh moderasi dari

kepemilikan keluarga, penelitian ini berfokus pada pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik menjadi topik yang menarik untuk diteliti dikarenakan banyak kasus penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan yang memiliki latar belakang kedekatan dengan instansi pemerintah atau partai politik di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Penghindaran Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku perpajakan (Mardiasmo, 2016 hal. 3) yaitu: ”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang - undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1) iuran dari rakyat kepada negara, (2) dipungut berdasarkan undang - undang, (3) tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, (4) digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Menurut (Zain, 2008 hal. 43) penghindaran pajak yang disebut juga *tax Planning,* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau perbuatannya tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan.

(Hanlon & Heitzman, 2010) menyebutkan bahwa penghindaran pajak *(tax avoidance)* adalah pengurangan pajak secara eksplisit, kegiatan penghindaran pajak secara khusus dilakukan untuk mengurangi pajak, dan manfaat pajak yang ditargetkan dari kegiatan lobi. Penghindaran pajak merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, sesuatu seperti investasi obligasi berada di satu sisi (pajak eksplisit yang lebih rendah, dan legal).

Penelitian tentang penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2017) mengemukakan bahwa di Indonesia kasus penghindaran pajak banyak dilakukan dengan status kepemilikan dan direksi yang memiliki hubungan informal dengan pemerintah atau partai politik. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Widya H dan Diyanti 2018) mengemukakan bahwa tindakan penghindaran pajak dilakukan di Indonesia salah satu faktornya adalah koneksi politik. Kebanyakan dari perusahaan melakukan hubungan informal dengan pemerintah atau

partai politik untuk upaya memperkecil pengeluaran pajak yang harus dikeluarkan perusahaan.

Teori Agensi Dalam Penghindaran Pajak

(Scoot, 2009) menyatakan bahwa memahami sepenuhnya kepentingan pihak manajemen dalam pelaporan keuangan perlu kiranya mempertimbangkan beberapa model dari teori permainan *(Game Theory).* Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara beberapa persaingan.

"Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of principal when the agent's interests would otherwise conflict with those of the principal" (scoot, 2009)

Teori agensi dapat terwujud dalam kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing–masing pihak dengan tetap memperhitungkan kebermanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil. Inti dari teori agensi adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal konflik kepentingan.

Sebuah perusahaan akan melakukan pemisahan kekayaan antara pemilik dengan perusahaan. Pemilik perusahaan akan menunjuk suatu manajemen untuk mengelola kekayaan perusahaan, pendelegasian tersebut mengarahkan kepada manajer untuk mengambil tindakan strategis untuk perusahaan. Teori agensi sendiri mengartikan suatu hubungan antara pemberi kerja dengan penerima kerja untuk melaksanakan pekerjaan.

Koneksi Politik

Koneksi politik dalam dunia bisnis memang sangat dekat hubungannya terutama untuk era sekarang, tidak dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sosial termasuk perekonomian saat ini tidak lepas dari nuansa politik bahkan hampir semua aspek kehidupan saat ini dihubungkan dengan politik. Koneksi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan. Koneksi politik dipercaya sebagai salah satu sumber yang sangat berharga bagi perusahaan karena dengan terjalinnya perusahaan dengan politik dipercaya dapat menghindarkannya dari pajak (Wicaksono, 2017).

Sedangkan makna dari politik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota yang berstatus negara *(citystate)* menurut aristoteles dan plato politik dianggap sebagai upaya untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik.

Tujuan dari politik sendiri adalah untuk mendapatkan kekuasaan dan membantu terselenggaranya kekuasaan di sekitar masyarakat.

Sebuah koneksi politik erat kaitannya dengan suatu komunikasi dan hubungan yang bermaksud untuk mempermudah suatu kepentingan. Politik yang ada di masyarakat sendiri tentunya merupakan bagian dari, dan dipengaruhi oleh budaya politik suatu masyarakat. Pada saat yang sama komunikasi politik juga dapat melahirkan, memelihara, dan mewariskan budaya politik. Salah satu unsur peranan yang ada di dalam politik adalah budaya politik, komunikasi politik dan sistem politik. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lain (Muhtadi, 2008 hal 28). Secara sederhana unsur – unsur tersebut digambarkan sebagai berikut:

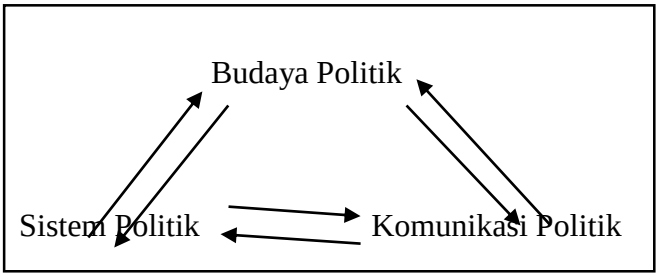

Koneksi politik bertujuan mengakomodasi kepentingan perusahaan termasuk di dalamnya kepentingan perpajakan, Koneksi politik sering terjadi di negara–negara berkembang. Koneksi politik tersebut dilakukan dengan menempatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah sehingga pihak pemerintah memiliki koneksi terhadap struktur organisasi perusahaan apakah itu komisaris maupun direksi (Fisman, 2001)

Perusahaan yang memiliki koneksi politik umumnya sering kali melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan perusahaan agar memiliki risiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung dengannya. Selain dari pada itu koneksi politik juga membantu perusahaan mendapatkan informasi perubahan peraturan perpajakan pada masa yang akan datang. Tidak hanya itu, bahwa koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat (Kim & Zhang, 2016).

Hipotesis Penelitian

Telah diketahui bahwa koneksi politik dalam pengertiannya memiliki peran dalam memudahkan kepentingan perusahaan dalam upaya penghematan pengeluaran pajak. Perusahaan akan berlomba–lomba dalam menghindari pajak dengan upaya membangun komunikasi dengan pemerintah atau dengan partai politik agar mendapatkan manfaat dari kawan politik perusahaan tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kim & Zhang, 2016) mengemukakan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif untuk mendorong terjadinya agresivitas pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2017)

mengungkapkan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2018) juga mengungkapkan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menguji data empiris dengan menggunakan dasar kerangka teori yang menggambarkan hubungan antar variabel, lalu membangun hipotesisnya (Indriantoro dan Supomo 2012). Variabel pada penelitian ini adalah koneksi politik terhadap penghindaran pajak yang diuji menggunakan data empiris dengan analisa data.

Populasi

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2017, hal 50). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 – 2018.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah tapi tidak semua, elemen populasi akan membentuk sampel (Hartono J., 2016, hal 92) Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode penyempelan dengan maksud atau pertimbangan tertentu (*Purposive sampling).* Kriteria sampel yang ditentukan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan dengan lengkap dari tahun 2016 sampai 2018.
2. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2016 sampai 2018.
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah atau satuan nilai rupiah dalam menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2016 sampai 2018.
4. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian dari tahun 2016 sampai 2018.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian Ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang

telah tersedia dan tidak dikumpulkan oleh peneliti secara pribadi (Sekaran, 2017, hal 41). Data ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu *www.idx.co.id*. Informasi yang dibutuhkan peneliti yaitu perusahaan yang melampirkan dalam laporan keuangannya jumlah aset, jumlah aset bersih, jumlah laba sebelum pajak, jumlah liabilitas perusahaan, dan profil direksi perusahaan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang terikat atau variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2017, hal 77). Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan ialah penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang disebut juga *tax Planning*, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau perbuatannya tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan. (Zain, 2006 hal 43).

Variabel Independen

Variable Independen adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2017, hal 79). Koneksi politik merupakan suatu hubungan istimewa yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah atau partai politik yang bertujuan untuk memudahkan urusan perusahaan dan menurunkan deteksi pajak yang lebih rendah (Wicaksono, 2017). Koneksi politik banyak digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan.

Variabel Kontrol

Variabel kontrol atau biasa disebut dengan variabel pelengkap adalah variabel yang digunakan untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausal atau hubungan sebab akibat supaya mendapatkan model empiris yang lebih lengkap dan lebih baik (Hartono J., 2016, hal 188). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Return on Asset (ROA), Leverage (LEV), Ukuran Perusahaan (Size), Capital Intensity (CI).

Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. ETR adalah model yang dikembangkan oleh (Frank et al, 2009), *Effective tax rate* (ETR) dihitung dengan membagi total beban pajak

perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan yaitu sebagai berikut:

$$Effective\ tax\ rate\ (ETR) = \frac{Total\ Tax\ Expense}{Pre - Tax\ Income}$$

Koneksi Politik

Koneksi politik diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dimana 0 (nol) menyatakan tidak ada koneksi politik melalui direksi perusahaan dan 1 (satu) menyatakan adanya koneksi politik melalui direksi, dewan komisaris dan komite audit perusahaan (Butje & Tjondro, 2014).

Variabel Kontrol

Return on Asset

Rasio yang menggambarkan profitabilitas perusahaan diukur dengan cara membandingkan pendapatan sebelum pajak perusahaan terhadap total aset awal tahun perusahaan, (Chen *et al* 2010),

$$Return\ On\ Asset\ (ROA) = \frac{Laba\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Aset}$$

Leverage

Rasio yang menggambarkan tingkat utang perusahaan terhadap aset perusahaan, (Chen et al, 2010)

$$Leverage = \frac{Total\ Liabilitas}{Total\ Aset}$$

Ukuran Perusahaan (Size)

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Rasio ini menggambarkan ukuran perusahaan yang diukur melaui logaritma natural dari nilai pasar ekuitas pada awal tahun, (Richardson et al, 2013)

$$Ukuran\ Perusahaan\ (Size) = Ln\ (Total\ Aset$$

Capital Intensity (CI)

Rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) Lestari (2019) *capital intensity* dapat dirumuskan sebagai berikut, (Noor at al., 2010)

$$Capital\ Intensity\ Ratio\ (CI) = \frac{Total\ Aset\ Tetap\ Bersih}{Total\ Aset}$$

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif bertujuan untuk mengenali pola data, merangkum informasi dalam data, dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang diinginkan peneliti. Sebelum dianalisis data akan dikumpulkan dan diolah agar data siap untuk dianalisis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data regresi linear berganda. Teknik analisis regresi ialah merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

korelasi antara variabel. . Model persamaan yang diperoleh dari pengolahan data diupayakan normal dan terbatas dari asumsi. Analisis regresi linear berganda yang dilakukan menggunakan alat bantu yaitu *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Karakteristik data yang di maksud adalah menggambarkan karakteristik distribusi nya. Statistik deskriptif menyediakan nilai frekuensi, mengukur tendensi pusat, dan pengukur–pengukur bentuk (Hartono J., 2016, hal 195).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen memiliki data berdistribusi normal atau tidak Model yang baik adalah model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018, hal 195) Model grafik dengan melihat Histogram dan Normal P Plot. Metode statistik menggunakan alat Kolmogorov Smirnov.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan antara variabel–variabel bebas. Uji multikolinearitas diuji dengan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*.

Apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas (Ghozali, 2018, hal. 107).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terdapat ketidaksamaan *residual variance* dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara data yang diurutkan berdasarkan urutan waktu (*time series*). Untuk pengujian auto korelasi dilakukan dengan metode *Durbin - Watson.* Apabila nilai *Durbin – Watson* yang dihasilkan d > dU dan (k - d) > dU maka dapat dinyatakan bahwa model regresi bebas dari gangguan autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif. Dimana nilai (d) merupakan DW, dU merupakan nilai table DW dan (k) merupakan jumlah variabel independen (Ghozali, 2018, hal 111).

e. Pengujian Hipotesis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesisnya adalah metode regresi linear berganda. Regresi linear berganda ialah, regresi linear yang melibatkan dua atau lebih variabel. Berikut

ini merupakan rumus regresi linear berganda :

$$Tax_{it} = \alpha 0 + \beta 1\, KP_{it} + \beta 2\, ROA_{it} + \beta 3\, LEV_{it} + \beta 4\, SIZE_{it} + \beta 5\, CI_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan

Tax_{it} : Penghindaran Pajak

$\alpha 0$: *Intercept* atau konstanta

$\beta 1\, KP_{it}$: Koneksi Politik

$\beta 2\, ROA_{it}$: *Return on Asset*

$\beta 3\, LEV_{it}$: *Leverage*

$\beta 4\, SIZE_{it}$: Ukuran Perusahaan

$\beta 5\, CI_{it}$: *Capital Intensity*

ε_{it} : Eror

f. Uji Determinasi

Koefisien determinasi mengukur seberapa besar variabel dependen mampu menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dilihat pada kolom *Adjusted R-Square* yang muncul pada tabel *Model Summary* output hasil regresi dengan SPSS.

g. Uji T

Uji statistik t digunakan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian yang digunakan pada uji statistic t adalah jika t dihitung lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut berarti variabel independen mempunyai pengaruh individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018, hal 179).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018, dan selama periode penelitian perusahaan tersebut tidak keluar dari bursa efek Indonesia dan atau mengalami delisting, serta memposting laporan keuangannya menggunakan nilai rupiah dan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.

Sampel Penelitian

Adapun proses penyeleksian sampel berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan dalam tabel.

No	Kriteria Sampel	Total Perusahaan
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018	184
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangannya secara berturut – turut periode 2016 – 2018	(33)
3.	Perusahan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode 2016 – 2018	(55)
4.	Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangannya tidak menggunakan mata uang rupiah	(18)

5.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data yang di butuhkan dalam penelitian	(12)
6.	Sampel	66
7.	Total observasi (66 x 3)	198

Hasil Uji Analisis Data Penelitian

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berikut adalah tabel hasil olahan data mengenai statistik deskriptif, pada tabel.

	N	Min	Max	Mean	SD
ETR (Y)	198	0.027	0.971	0.281	0.131
Koneksi Politik (X1)	198	0	1	0.864	0.344
ROA (X2)	198	0.002	0.709	0.112	0.113
LEVERAGE (X3)	198	0.077	2.056	0.418	0.259
SIZE (X4)	198	25.216	33.474	28.698	1.692
CI (X5)	198	0.091	0.808	0.446	0.158

2. Hasil Uji Asumsi Klasik Regresi

a. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hipotesis yang digunakan :

H_0 : residual tersebar normal

H_1 : residual tidak tersebar normal

Jika nilai **sig.** (*p-value*) > 0,05, maka H_0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		171
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22105531
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.075
	Negative	-.094
Kolmogorov-Smirnov Z		1.232
Asymp. Sig. (2-tailed)		.096

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil perhitungan didapat nilai **sig.** sebesar 0.096 dapat dilihat pada Tabel 4.3 atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

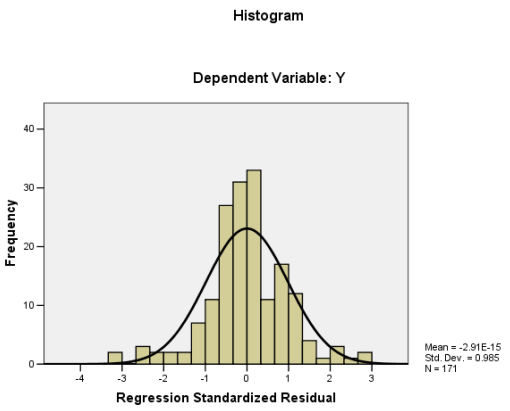

Berdasarkan uji Grafik Histogram didapatkan bahwa frekuensi Residual paling banyak mengumpul pada nilai 0 atau nilai penyebaran data sudah sesuai dengan kurva normal sehingga dikatakan bahwa residual sudah menyebar secara distribusi normal.

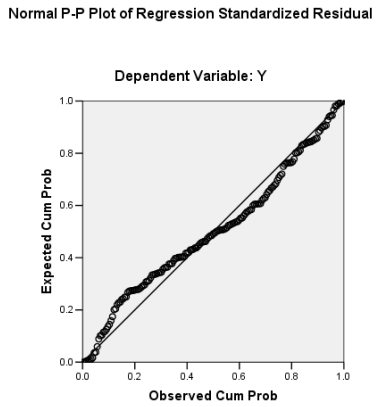

Berdasarkan uji P-P Plot didapatkan bahwa titik–titik data sudah menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga dikatakan bahwa residual sudah menyebar secara distribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel

Variabel Bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0.963	1.039
X2	0.790	1.267
X3	0.944	1.059
X4	0.860	1.163
X5	0.855	1.169

Pada hasil pengujian ini didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

c. Uji Heterokedastisitas

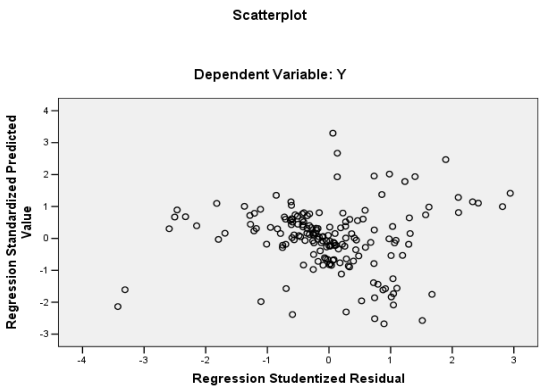

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai

ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.821

Dari Tabel 4.10 diketahui nilai uji Durbin Watson sebesar 1,821 yang terletak antara 1.801 dan 2.199, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi.

Hasil Uji Hipotesis

a. Persamaan Regresi

Variabel Bebas	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.549	1.223		-1.267	0.20
X1	0.327	0.057	0.378	5.736	0.00
X2	-0.127	0.021	-0.432	-5.944	0.00
X3	0.027	0.031	0.058	0.878	0.38
X4	-0.132	0.354	-0.026	-0.373	0.71
X5	-0.093	0.045	-0.144	-2.063	0.04

Berdasarkan pada Tabel 4.6 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = b1\ X_1 + b2\ X_2 + b3\ X_3 + b4\ X_4 + b5\ X_5 + \varepsilon$$

$$Y = 0{,}378\ X_1 - 0{,}432\ X_2 + 0{,}058\ X_3 - 0{,}026\ X_4 - 0{,}144\ X_5$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Koefisien b1 sebesar 0,378, artinya ETR akan meningkat sebesar 0,378 satuan untuk setiap perusahaan memiliki koneksi politik. Jadi apabila perusahaan memiliki koneksi politik, maka ETR akan meningkat sebesar 0,378 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- Koefisien b2 sebesar -0,432, artinya ETR akan menurun sebesar 0,432 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (ROA), Jadi apabila ROA mengalami peningkatan 1 satuan, maka ETR akan menurun sebesar 0.432 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- Koefisien b3 sebesar 0,058, artinya ETR akan meningkat sebesar 0,058 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_3 (Leverage), Jadi apabila Leverage mengalami peningkatan 1 satuan, maka ETR akan meningkat sebesar 0.058 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- Koefisien b4 sebesar -0,026, artinya ETR akan menurun sebesar 0,026 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_4 (SIZE), Jadi apabila SIZE mengalami peningkatan 1 satuan, maka ETR akan menurun sebesar 0.026 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- Koefisien b5 sebesar -0,144, artinya ETR akan menurun sebesar 0,144 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_5 (CI), Jadi apabila CI mengalami peningkatan 1 satuan, maka ETR akan menurun sebesar

0.144 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

b. Adjusted (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
0.558	0.311	0.291

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 4.6 diperoleh hasil adjusted R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,291. Artinya bahwa 29,1% variabel ETR akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Koneksi Politik (X_1), ROA (X_2), Leverage (X_3), SIZE (X_4), CI (X_5). Sedangkan sisanya 70,9% variabel ETR akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

c. Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.549	1.223		-1.267	.207
	X1	.327	.057	.378	5.736	.000
	X2	-.127	.021	-.432	-5.944	.000
	X3	.027	.031	.058	.878	.381
	X4	-.132	.354	-.026	-.373	.710
	X5	-.093	.045	-.144	-2.063	.041

a. Dependent Variable: Y

Menurut hasil uji t dapat disimpulkan bahwa:

1. Penghindaran pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Koneksi Politik atau dengan meningkatkan Koneksi Politik maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan secara signifikan.
2. Penghindaran pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh ROA atau dengan meningkatkan ROA maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan secara signifikan.
3. Penghindaran pajak tidak dapat dipengaruh oleh leverage.
4. Penghindaran pajak tidak dapat dipengaruhi oleh SIZE.
5. Penghindaran pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh CI atau dengan meningkatkan CI maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan secara signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris variabel apa saja yang mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel koneksi kolitik, dan variabel kontrol *return on asset*, *leverage*, rasio ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap variabel terikat yaitu penghindaran pajak.

Penelitian ini menemukan bukti bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan

berpengaruh dalam upaya penghindaran pajak. Semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi penghindaran pajak yang terjadi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Penelitian ini berfokus pada pengaruh koneksi politik yang dimiliki parusahaan terhadap upaya penghindaran pajak yang ada di perusahaan manufaktur, harapannya untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Faktor lain yang dimaksud seperti lokasi perusahaan dan lain sebagainya.
2. Untuk manajemen perusahaan, peneliti menyarankan untuk memahami lebih dalam dan mentaiati peraturan perpajakan yang sudah ada karena pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara Untuk pemerintah peneliti berharap hasil penelitian ini dijadikan evaluasi dalam upaya peningkatan pemasukan negara dari sektor penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Annuar, H. A., Salihu, A. I., & Obid , S. S. (2014). Corporate Ownership Govermance and tax avoidance : *Procedia-Social and Behavioral Sciences,* 164, 150-160.

Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap tax avoidance . *Tax & Accounting Review,* 4, No 2, 2-10

Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shelvin, T. (2010). Are Family Firm More Tax Aggressive Than non Family Firm?. *Journal of Financial Economics*. 91(1), 41-61.

Faccio, M. (2006). Politically-Connected Firms. *American Economics Review*. 96(1), 369-386.

Fisman, R. (2001). Estimating The Value Of Political Connections . *American Economics Review*, 91(4), 1095-1102.

Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Rporting, *The Accounting Review*, 84(2), 467-496.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gomez, E. T. (2009). The Rise and Fall of Capital: Corporate Malaysia in Historical Perspective. *Journal of Contemporary Asia.* 39(3), 345-381.

Hanlon, M., & Hietzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*. 50, 127-178

Hartono, J. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh Moderasi Koneksi Politik

Terhadap Kepemilikan Keluarga dan Agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 22, No 1, 45-60.

Jefriando, M. (2016, November 1). *Melihat Perkembangan Industri manufaktur di Kuartal III 2016*. Retrieved April 9, 2020, diakses dari http//finance.detik.com

KIM, C., & Liandong, Z. (2016). Corporate Political Conncetions and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research* , 33, 78-114.

Lestari, S. P., Pratomo, D., & Asalam, D. A. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak . *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41-54.

Maharani, T. (2019, Oktober 15). *Balikan dengan GERINDRA, Sandiaga jadi Wakil Ketua Dewan Pembina Lagi*. April 18, 2020, diakses dari http//.detik.com

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* . Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Noor, R. M., Fadzillah, N. S.,& Mastuki, N.,(2010). Corporate Tax Planning: A study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade Economics and Finance.* 1(2) 189-193.

Prastiwi, D. (2019, Oktober 23). *Profil Luhut Pandjaitan yang kembali dipilih jadi Menteri Jokowi*. 18 April, 2020, diakses dari http//.liptan6.com

Putri, R. V. (2018). Keterkaitan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan* , 4, No 1, 20-28.

Richardson, G., Taylor. G., & Lanis, R. (2013). The Impact of Board of Director Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: An Emperical Analysis. *Journal of Accounting and Public policy.* 32(3). 68-88

Sekaran, U. (2017). *Research Method for Bussiness.* Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Negara Republik Indonesia No 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf

Wahab, A. E., Ariff, M. A., Marzuki, M. M., & Sanusi , M. Z. (2016). Political Conncetions, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness in Malaysia *.Asian Review of Accounting*, 25 No 3, 421-451.

Wicaksono, A. P. (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak : Fenomena di Indonesia . *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10 No 1, 167 - 180 .

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.